

# IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Petrus Fian Beribe

NPP. 30.1120

Asdaf Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [beribepetrusfian@gmail.com](mailto:beribepetrusfian@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** (Contains the background of the research). The author focuses on the implementation of non-cash food assistance (BPNT). **Purpose:** The aim of this research is to identify and describe the implementation of non-cash food assistance (BPNT) in Larantuka District. **Methods:** This study uses qualitative methods and inductive data analysis with implementation using Van Meter and Van Horn theories. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (17 informants), and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of non-cash food assistance (BPNT) in Larantuka District has been going quite well by fulfilling 6T and procedures and facilities and infrastructure that are adequate but there is still a lack of awareness from beneficiary families (KPM) as well as government staff and inadequate supervision from the local government. **Conclusion:** the implementation of non-cash food assistance (BPNT) in Larantuka District has been going well by fulfilling 6T and adequate procedures and facilities and infrastructure greatly affect the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) properly as evidenced by the poverty rate every year is decreasing in Larantuka District, it is advisable to provide socialization to people who do not understand about the non-cash food assistance program (BPNT).

**Keywords:** Implementation, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Beneficiary Families (KPM)

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data secara induktif dengan implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (17informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka telah berjalan dengan cukup baik dengan sudah memenuhi 6T dan prosedur serta sarana dan prasarana yang sudah memadai namun masih kurangnya kesadaran dari keluarga penerima manfaat (KPM) dan juga tenaga pemerintah serta pengawasan yang masih belum memadai dari pemerintah setempat. **Kesimpulan:** implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka telah berjalan baik dengan sudah memenuhi 6T dan prosedur serta sarana dan prasarana yang memadai

sangat mempengaruhi untuk terlaksananya program bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan baik yang dibuktikan dengan angka kemiskinan yang tiap tahun makin menurun di Kecamatan Larantuka, disarankan untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengerti tentang program bantuan pangan non tunai (BPNT).

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Keluarga Penerima manfaat (KPM)

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara mana pun di dunia. Kemiskinan juga merupakan gambaran kehidupan di mana rendahnya kesejahteraan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara maupun situasi global, pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan dalam hal kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau pemasukan yang cukup guna mendapatkan taraf hidup di atas minimal standar sejahtera. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang maka di mana kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2006) kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut: Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah, akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Kecamatan Larantuka merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecamatan Larantuka merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak yang menjadikan Kecamatan Larantuka salah satu target dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 18.261 dari total penduduk 45.515 jiwa yang tersebar di 18 Kelurahan dan 2 Desa yang nantinya mendapatkan bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan syarat mengumpulkan fotocopy KK, fotocopy KTP, Kartu Sembako, Surat Undangan Pemberitahuan dari Ketua RT, dan sertifikat vaksin tahap 1, 2, dan 3. Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000, per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program Bantuan Pangan Non tunai periode bulan Januari-Februari Rp 150.000, namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli kebutuhan pangan dan sembako sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-Warong. Sedangkan untuk memastikan nama sudah terdaftar di data

terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bisa dengan cara cek penerima di link [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Bantuan Pangan Non Tunai BPNT juga memberikan kreativitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha ekonomi produktif. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Kecamatan Larantuka merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecamatan Larantuka merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak yang menjadikan Kecamatan Larantuka salah satu target dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 18.261 dari total penduduk 45.515 jiwa yang tersebar di 18 Kelurahan dan 2 Desa yang nantinya mendapatkan bantuan. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan syarat mengumpulkan fotocopy KK, fotocopy KTP, Kartu Sembako, Surat Undangan Pemberitahuan dari Ketua RT, dan sertifikat vaksin tahap 1, 2, dan 3. Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000, per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program Bantuan Pangan Non tunai periode bulan Januari-Februari Rp 150.000, namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli kebutuhan pangan dan sembako sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-Warong. Sedangkan untuk memastikan nama sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bisa dengan cara cek penerima di link [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Bantuan Pangan Non Tunai BPNT juga memberikan kreativitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha ekonomi produktif. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Data Terpadu Jumlah rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2018. Di mana pemerintah sudah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun yang kita ketahui meski dengan program tersebut masih belum dapat menuntaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana data di atas masih menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Larantuka dari tahun 2017-2018.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Kuswatun Khasanah berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi

Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang (Kuswaton Khasanah 2020), adanya program bantuan pangan non tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada e-Warong Program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan juga Membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan. Penelitian Aulia Nurmalita Sari berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi di Kelurahan Sungailiat (Aulia Nurmalita sari 2022), bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Kelurahan Sungailiat di khususnya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sudah terdaftar dalam DTKS sehingga program ini dinilai tepat sasaran. Hal ini dibuktikan oleh adanya monitoring secara langsung yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Penelitian Ananda Natasia Zega berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mengetaskan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Balai Kota Provinsi Sumatera Utara. (Ananda Natasia Zega 2021, Proses validasi data dalam pelaksanaan program BPNT dilakukan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial Kota Tanjung Balai dan Kelurahan yang terkait, Penelitian Basriati, B berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (Basriati. B 2021) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang 91 perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin, Ratna Juwita berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (Ratna Juwita 2022) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang 91 perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dimana implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT), penghambat yang dialami dalam implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan, serta upaya mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam kebijakan implementasi kebijakan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswantu, Aulia Nurmalita, Ananda Natasia, Ratna Juwita, dan Basriati. B. Penelitian ini lebih cenderung membahas mekanisme pelaksanaannya serta seberapa efektivitasnya pelaksanaan seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 dimensi yakni tandar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Organisasi Pelaksana Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Sikap Kecenderungan Para Pelaksana Kebijakan. Peneliti melakukan penelitian yang sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun penelitian ini dilakukan

secara spesifik dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT). Penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa penelitian tersebut, namun beberapa yang membedakannya yaitu seperti objek penelitian, lokasi penelitian, serta kebijakan implementasi yang diusung dalam topik penelitian.

## **1.5. Tujuan .**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka, untuk mengetahui dan menggambarkan penghambat implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka, untuk mengetahui dan mengkaji upaya mengatasi penghambat implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka

## **II. METODE**

penulis memilih metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat alamiah, dengan ciri cirinya sebagai berikut: "Alami, Instrumennya Yaitu Manusia, Model Kualitatif, Analisis Data Secara Induktif, Teori Dari Dasar, Deskriptif, Mementingkan Proses Daripada Hasilnya, Fokus Sebagai Pembatasan Masalah dan Keabsahan Data Memiliki Kriteria Khusus. Berdasarkan ciri-ciri diatas penulis menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan induktif dalam melaksanakan penelitian ini. Melalui metode deskriptif akan memberikan sebuah gambaran sistematis mengenai situasi, kegiatan, ataupun peristiwa yang ada di lapangan. Metode ini memudahkan penulis untuk memahami permasalahan yang sedang di teliti. Pendekatan induktif adalah pendekatan dengan pemahaman dari konsep khusus ke umum. Penggunaan pendekatan induktif dengan maksud untuk memahami arti dari data yang sukar dipahami dengan cara dikembangkan dari suatu tema lalu dirangkum berdasarkan hasil data yang didapatkan. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan 17 informan diantaranya 1 orang kepala dinas sosial, 1 orang sekretaris dinas sosial, 1 orang pengelolaan data fakir miskin, 1 orang camat Larantuka, 2 orang lurah dan kepala desa, 8 orang pemilik e-warong, 3 orang Keluarga Penerima manfaat (KPM). peneliti menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Basorawi bahwa, teorinya membagi analisis data menjadi beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selanjutnya Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh Sugiyono yaitu, triangulasi data. Teknik triangulasi data dirancang untuk menguji kredibilitas data yang dikumpulkan sehingga data yang dikumpulkan sudah teruji kredibilitasnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang menggunakan enam tahap yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, sikap kecenderungan para pelaksana kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab sebagai berikut.

### **3.1. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Pada Kamis, 26 Januari 2023 bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur peneliti melakukan wawancara dengan dengan Bapak Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos selaku Kepala

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa: "Setiap program yang dibuat oleh selalu mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dengan adanya SOP tersebut maka kebijakan dapat terarah sesuai dengan manfaat dan tujuan pelaksanaannya. Dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat regulasi yang diatur langsung oleh Kementerian Sosial dan juga terdapat buku pedoman umum program BPNT 2020 tahun 2020". Diwaktu dan tempat yang sama Bapak Yohanes Daton Beribe, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyatakan bahwa: Pihak Kecamatan Memedomani permensos dalam melihat tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan program BPNT ini untuk membantu masyarakat yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan perbulannya dan memberikan pemenuhan gizi. Hal ini juga diatur dalam permensos Nomor 20 tahun 2020. Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu untuk memberikan manfaat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan cara mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan di Kecamatan Larantuka di khususnya kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga program ini dinilai tepat sasaran. Hal ini dibuktikan oleh adanya monitoring secara langsung yang dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial Yang menangani Program BPNT, koordinator wilayah BPNT beserta pendamping dan pengawas penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

### **3.2. Sumber Daya Kebijakan**

#### **A. Sumber Daya Manusia**

Pada Kamis, 26 Januari 2023 bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur peneliti melakukan wawancara dengan dengan Bapak Marselis Rita Fernandez, SST, M.Si. selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa: Jumlah pegawai ASN di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur khususnya pada bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) yang menanngi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dirasa masih sangat kurang, dengan jumlah ASN 3 orang dan Tenaga Kontra 1 orang terlebih jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Flores Timu dan jumlah penduduknya. Seperti dalam wawancara dengan Bapak Ir. Alosius Riberu selaku Camat Larantuka , menyatakan bahwa: Banyaknya penduduk yang berada di Kecamatan Larantuka sehingga penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini lebih banyak daripada Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Flores Timur, dengan banyaknya jumlah penerima ditambah dengan SDM di Kecamatan Larantuka terbatas. Pihak Kecamatan Larantuka mengatasi hal ini dengan membuat pertemuan rutin antara TKSK dan pendamping yang akan sama sama membantu mengevaluasi program BPNT. Kesimpulan yang bisah diambil dari kedua pendapat dari hasil wawancara diatas yaitu Dinas Sosial, dan Kecamatan Larantuka bahwa masih mengalami kekurangan sumber daya pegawai dikarenakan ketimpangan jumlah pegawai dengan penerima manfaat dan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengangkatan dan pembukaan jumlah lowongan pekerjaan dan anggaran yang tidak mencukupi apabila mengangkat pegawai.

#### **B. Sumber daya Sarana dan Prasarana**

Kendala pada mesin Electronic Data Capture (EDC) membuat terjadinya penumpukan antrian dalam pengambilan BPNT yang diurus oleh e-warong. Pelayanan yang diberikan di e-warong semaksimal mungkin diberikan secara terbuka, dan cepat dengan cara membagi kloter per kelurahan sehingga tidak menumpuk pada satu waktu. Analisis terakhir mengenai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu kartu yang berguna sebagai identitas dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berfungsi sebagai uang elektronik.

### **C. Sumber Daya Finansial**

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebagai bidang yang menaungi program BPNT Kabupaten Flores Timur khususnya Kecamatan Larantuka, menyatakan bahwa: Untuk dana penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari APBN dengan alur kementerian sosial mentransfer langsung ke bank penyalur sehingga bank penyalur dapat mentransfer kepada KPM melalui KKS selanjutnya oleh KPM yang telah menerima dana program BPNT akan membelanjakan saldo tersebut di e-warong. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari dana APBN. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis diatas, maka sarana dan prasarana program BPNT di Kecamatan Larantuka dinilai cukup baik, tetapi perlu adanya peningkatan dan dipertahankan agar penyaluran bantuan dapat tetap teroganisir dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

### **3.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan**

Proses komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melibatkan berbagai pihak, bukan hanya tugas pemerintah Kecamatan Larantuka maupun Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang sinkron dan efektif antar dinas sosial Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Larantuka, pendamping program BPNT Komunikasi antar organisasi dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marselis Rita Fernandez, SST, M.Si selaku Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, menyatakan bahwa: Pertama dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan terkhusus kepala seksi kesejahteraan mengenai kriteria calon KPM BPNT selanjutnya masing masing desa dan kelurahan memasukkan data DTKS yang akan dikirim ke dinas sosial kepada kementerian sosial selanjutnya akan ditetapkan SK penerima BPNT selanjutnya akan diserahkan ke pendamping sosial BPNT. Sosialisasi rutin dan berkala diberikan setiap bulan kepada pihak e-warong mengenai kualitas dari bahan pangan yang akan disiapkan oleh e-warong dan mengenai sistem penyalurannya. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi pemerintah dalam standar dan tujuan bahkan sumber daya dari program BPNT dilakukan secara rutin dan konsisten. Hal ini tidak luput dari kerjasama antar Lembaga yaitu Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial selaku penanggungjawab utama dalam menyampaikan teknis pelaksanaan program dibantu oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin lalu Bank BRI sebagai bank penyalur, Kecamatan Larantuka beserta korda dan pendamping di setiap kecamatan.

### **3.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin telah menginformasikan mengenai pembagian tugas dalam pelaksanaan program BPNT mulai dari pembagian tugas dalam persiapan registrasi pembukaan rekening pembagian tugas pasca registrasi dan pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lalu pembagian tugas pemantauan dan pemanfaatan BPNT Berdasarkan hal tersebut pembagian tugas dalam pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Flores Timur sudah jelas karena langsung diatur oleh pemerintah pusat. Pelaksana program BPNT juga sudah pasti memahami bagaimana tugasnya masing masing dikarenakan untuk menjadi pelaksana program BPNT ini perekrutannya melalui beberapa tes yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. tingkat kepatuhan di Dinas Sosial dan Kecamatan Larantuka bahkan tingkat kepatuhan korda BPNT maupun pendamping BPNT Sudah baik mengenai integritas. Akan tetapi untuk kepatuhan masyarakat masih kurang namun lambat laun sudah mulai membaik. pengawasan dan pemantauan dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial, Hal ini termasuk dalam peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BPNT.

### **3.5. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik**

Dari keterangan yang diberikan oleh beberapa informan tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mengupayakan agar seluruh masyarakat miskin terbantu oleh bantuan sosial dan data ditentukan oleh pemerintah pusat dan terbatasnya kuota bantuan, mengakibatkan tidak semua masyarakat yang sudah terdaftar DTKS mendapatkan bantuan BPNT. Hal ini dapat terlihat bahwa pemerintah baik Kecamatan dan dinas sosial mendukung adanya program BPNT dikarenakan sangat membantu masyarakat yang berekonomi rendah.

### **3.6. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana Kebijakan**

#### **A. Pengetahuan dan Pemahaman Implementator terhadap program BPNT bagi KPM**

sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dengan tujuan memberikan bahan pangan dengan memedomani 6T tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. Meskipun pada pelaksanaan kebijakan maupun sikap dari pelaksana kebijakan maupun sikap dari masyarakat yang masih banyak belum mengetahui mengenai Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT)

#### **B. Sikap Pemerintah Dalam Melaksanakan program BPNT bagi KPM**

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya respon dari para pelaksananya baik respon positif maupun respon negative. Respon positif berarti mendukung adanya program/kebijakan yang dijalankan sebaliknya jika respon yang diberikan negative maka menentang adanya program tersebut. Namun dalam pelaksanaan program merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendukung agar tercapai tujuan dari program tersebut. Respon yang diberikan oleh para pelaksana terhadap program BPNT di Kecamatan Larantuka sudah cukup baik dan mendukung, sesuai dengan pernyataan Camat Larantuka menyatakan bahwa: "Program BPNT merupakan program pusat dimana pasti harus di support dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini membuktikan pihak Kecamatan Larantuka sangat mendukung adanya program BPNT.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

(Khasanah, 2020) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui sejauh mana penerapan BPNT dalam meningkatkan perekonomian ekonomi keluarga miskin yang berada di wilayah Kelurahan Ketapang dan juga membantu masyarakat dari sisi ekonomi melalui upaya memenuhi kebutuhan pokok agar bisa mengurangi beban pengeluaran yang memiliki nilai ekonomi rendah untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, observasi, dan dokumentasi Teknik analisis data dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan Adanya program BPNT Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada e-Warong Program BPNT Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana implementasi program sembako melalui bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penelitian terdahulu lebih terfokus pada peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Sari, 2022) dengan



judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Keluarga Penerima Manfaat Studi Di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui dan menganalisis implementasi program BPNT di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan agar Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program BPNT di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Pada penelitian ini penulis sebelumnya menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, Teknik analisis data dengan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu fokus penelitiannya lebih ke implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sedangkan persamaan yang diambil dari kedua penelitian ini adalah dalam lokusnya yang terfokus pada satu kecamatan. (Zega, 2021) dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mengetaskan Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara. Tujuan dari penelitian ini agar untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengetaskan kemiskinan di Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara dan Mendeskripsikan masalah dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengetaskan kemiskinan di kelurahan Tanjung Balai Kota III Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara. Tujuan dari penelitian ini agar untuk Mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah untuk mengatasi masalah dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengetaskan kemiskinan di Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Kualitatif Deskriptif dengan pengumpulan datanya dengan Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi dan Teknik analisis data dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu penelitian terdahulu lebih dalam hal mengetaskan kemiskinan dari program BPNT tersebut sedangkan penelitian yang saya ambil lebih ke banyak hal dalam perubahan dalam bentuk ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain, sedangkan persamaan yang diambil dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang program BPNT.

#### **4.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hilang atau rusak, pembaruan data DTKS, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana e-warong dalam tahap pembangunan, kekurangan informasi, belum tersedianya bahan pangan secara maksimal, dan kurang tersedianya layanan mesin EDC

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan Implementasi program sembako melalui BPNT di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah mulai berjalan dari tahun 2018 yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp. 150.000,00. Semenjak pandemi covid-19 jumlah manfaat bertambah menjadi Rp. 200.000,00 diperuntukan untuk ditukar di e-warong dengan sumber karbohidrat seperti beras, sumber protein; telur, ikan, daging, dan ayam, sumber vitamin; buah-buahan/ sayuran dan sumber mineral seperti kacang-kacangan. ketersediaan e-warong tidak sesuai pedoman umum program BPNT dan mesin EDC di setiap e-warong masih mengalami kendala dalam hal jumlah dan kualitas. Selain itu Faktor

penghambat dalam pelaksanaan implementasi program BPNT, meliputi: kartu hilang atau rusak dan KKS yang bersaldo 0, keterlambatan pembaruan data, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran dari masyarakat, sarana prasarana tambahan sedang dalam tahap pembangunan, kurangnya informasi, belum tersedianya bahan pangan secara maksimal, dan kurang tersedianya mesin EDC. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat dengan melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melakukan pembaruan Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan program BPNT, dan melakukan informasi/pemberitahuan berkala antar berbagai pihak.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan tidak bertepatan dengan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian berkelanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi bantuan pangan non tunai di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Dr.Drs. Andi Masrich, M.Si dan juga kepala dinas sosial Flores Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Nasional. (2006). *Indikator Utama Kemiskinan*.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. (2018). *Jumlah Rumah Tangga Miskin*.

Horn, V. M. dan Van. (1975). *Model-Model Dalam Kebijakan Implementasi*.

Khasanah, K. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*.

Sari, A. N. (2022). *Implementasi Program BPNT*.

Zega, A. N. (2021). *Implementasi Program BPNT*.

B, Basriati. 2021. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Gowa

Juwita, Ratna. 2022. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing.

Van Meter, Donalds and Carl E. van Horn. 1975." The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol.6 No. 4 February